

ABSTRAK

Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bagi para Anggota Luar Biasa (ALB), berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa “ALB disamping wajib mengikuti Magang dikantor dan Magang Bersama yang diadakan oleh Pengurus Wilayah, juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan, dengan pengumpulan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin, yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris sebelum mengajukan permohonan mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris”. Aturan mengenai jumlah poin ini dirasa memberatkan para calon Notaris karena selain dibutuhkan persiapan materi yang tidak sedikit, bagi para ALB yang berada diluar wilayah jawa juga jarang diselenggarakan seminar-seminar yang bersangkutan. Maka pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1. Kewenangan INI dalam menentukan syarat perolehan poin; dan 2. Upaya Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang tidak memenuhi syarat poin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian adalah INI sebagai Perkumpulan yang berbadan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2). INI juga sesuai dengan teori Badan Hukum yaitu teori organ dan teori kekayaan bersama. Mengacu kepada Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai tujuan, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris, maka keberadaan INI dapat ditujukan sebagai wadah bagi Notaris yang diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya, sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Upaya hukum yang dapat diambil yaitu dengan gugatan pembatalan peraturan perkumpulan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Kewajiban Memperoleh Jumlah Poin Tertentu, Anggota Luar Biasa, Ujian Kode Etik Notaris

ABSTRACT

According to the Notary Act, a Notary Public is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in this Law or based on other laws. One of the stages that becomes the focus of every prospective notary is the Notary Ethics Code Exam. For Extraordinary Members (ALB), based on what is stipulated in Indonesian Notary Association Association Number 14 / PERKUM / INI / 2018 concerning Registration of Extraordinary Members of the Indonesian Notary Association (ALB INI), in Article 4 it is stated that "ALB is required to follow the Internship at the office and Joint Internship organized by the Regional Management, are also required to participate in activities organized by the Association, with a collection of at least 18 (eighteen) points, which include activities carried out by the Central Management, Regional Management and Regional Management, as conditions for take the Notary Ethics Test before submitting an application to take the Notary Appointment Test ". The rule regarding the number of points is considered burdensome for Notary candidates because in addition to the need to prepare material that is not small, for ALB who are outside the territory of Java also rarely held the relevant seminars. Then the main issues discussed in this thesis are: 1. THIS Authority to determine the conditions for points acquisition; and 2. Legal Protection Efforts for Prospective Notaries who do not meet the point requirements. This research is a normative legal research and uses a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is INI as a legal body as explained in Article 82 paragraphs (1) and (2). IT is also in accordance with Legal Entity theory namely organ theory and shared wealth theory. Referring to Article 82 paragraph (4) of the Law of Notary Position, provisions concerning the purpose, authority, work procedures and organizational structure are stipulated in the Articles of Association and Bylaws of the Notary Organization, then the existence of THIS can be intended as a forum for Notaries who are expected to play an active role in provide direction and guidance for its members in carrying out their positions, so that the Notary Public can guarantee legal certainty and legal protection for notary services recipients and the wider community. Legal remedies that can be taken are by claiming the annulment of the rules of association in the State Administrative Court.

Key word : Obligation to Obtain Specific Points, Extraordinary Members, Notary Ethics Code Examination

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas limpahan rahmat, berkat, dan karunia Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis.

Tesis ini disusun dalam upaya memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, sumbangan pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ulik Sulistiyono, S.Sos dan Ir. Sri Rosmawati, M.Si. Terima kasih banyak atas doa, bimbingan, kasih sayang, kesabaran, motivasi, dan kepercayaan yang diberikan tiada henti kepada penulis selama ini.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan pengarahan dan persetujuannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.

4. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan kesabaran dan waktu berharganya kepada penulis untuk memberikan saran, petunjuk, nasehat, serta masukan yang bermanfaat selama penulis berada di bawah bimbingan beliau.
5. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., selaku dewan penguji tesis, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah dengan sabar mendidik, memberikan ilmu, pengetahuan, dan informasi yang penulis butuhkan.
7. Bapak dan Ibu staf akademik dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
8. Seluruh keluarga saya yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi, baik secara materil maupun moril kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua adik saya yaitu Aninda Forista Putri, S. Farm., dan Bagus Rachmadha serta kepada seluruh keluarga saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya selama saya melaksanakan pendidikan ini yaitu Suci Devika Amanah, S.H., M.Kn., Sarfia Nengsih, S.H., M.Kn., Puteri Melati, S.H., M.Kn., Dhea Amelisca, S.H., M.Kn., Desy Rizki Ramadhani, S.H., M.Kn., dan teman-teman kelas A Pagi Magister

Kenotariatan Universitas Airlangga angkatan 2017 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

10. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bila tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis mengharapkan bila tesis yang penulis susun ini akan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Surabaya, 20 Desember 2019

Penulis,

Ira Damayanti Putri

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW),

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.-HT.03.oi Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesian Nomor 14/PERKUM/INI/2018 Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI)